

Article

Strategi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu dan Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2024

Nofriadi¹, Raisatul Afra², Ananta Mulya Rachman³, Muhammad Nafis Anwar⁴, Annisa Ara Manatnine⁵, Dio Ananda Nugraha⁶, Helmi⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

*Correspondensi Penulis: Nof.salur@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the political participation of Generation Z (Gen Z) in Banda Aceh during the 2024 general and local elections, focusing on the factors that influence their engagement and the role of the Independent Election Commission (KIP) in enhancing participation. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with Gen Z university students and KIP members. The study applies Milbrath and Goel's theory of political participation as well as Campbell et al.'s theory of voter behavior to examine the dynamics of Gen Z involvement. The findings reveal that Gen Z demonstrated higher participation in the local elections (Pilkada) than in the general elections (Pemilu), driven by emotional closeness to local candidates and the relevance of regional issues. Additionally, KIP Banda Aceh successfully increased Gen Z participation through communicative and adaptive outreach strategies, such as campus-based activities and the use of social media platforms that align with Gen Z's daily lives. This research recommends the development of more participatory and contextual political communication strategies to further strengthen Gen Z's involvement in the democratic process, particularly in the context of local democracy in Banda Aceh.*

Keywords: *Political participation, Gen Z, KIP, Pemilu, Pilkada.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik Generasi Z (Gen Z) di Kota Banda Aceh dalam Pemilu dan Pilkada 2024, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka serta peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa Gen Z dan anggota KIP. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel serta teori perilaku pemilih Campbell et al. untuk mengkaji dinamika partisipasi Gen Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Gen Z lebih tinggi dalam Pilkada dibandingkan Pemilu, yang dipengaruhi oleh kedekatan emosional dengan kandidat lokal dan isu-isu daerah yang lebih relevan bagi mereka. Selain itu, KIP Banda Aceh dinilai berhasil meningkatkan partisipasi politik Gen Z melalui pendekatan sosialisasi yang komunikatif dan adaptif, seperti kegiatan di kampus serta pemanfaatan media sosial yang dekat dengan keseharian Gen Z. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi komunikasi politik yang lebih partisipatif dan kontekstual agar partisipasi Gen Z dalam proses demokrasi dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam konteks demokrasi lokal di Banda Aceh.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Gen Z, KIP, Pemilu, Pilkada.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.
Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik dan menentukan arah pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu tolak ukur penting bagi kualitas demokrasi suatu negara. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Charles Andrian dan James Smith dalam Marijan, partisipasi politik dapat dibagi dalam tiga bentuk: partisipasi aktif, pasif, dan ekspresif, yang mencakup aksi protes, boikot, atau petisi (Marijan, 2019).

Selanjutnya, Pada sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” memiliki makna bahwasannya kedaulatan rakyat merupakan pokok dari demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi yang demikian berlangsung melalui pemilu dan pilkada secara langsung maupun tidak langsung baik itu DPR/DPRD, atau diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam bingkai permusyawaratan rakyat (Wahyu Widodo, 2015)

Dalam konteks ini, pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan dua aspek penting dalam sistem demokrasi di Indonesia (Kesmawan and Marja 2021). Pemilu secara umum adalah mekanisme untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan, termasuk memilih Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap lima tahun sekali. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan prinsip-prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Boediningsih & Budi Cahyono, 2022).

Sementara itu, Pilkada, atau Pemilihan Kepala Daerah, merupakan proses demokrasi yang fundamental di Indonesia, di mana pemilih memilih pemimpin daerah mereka, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini diatur berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga menjadi bagian integral dalam sistem pemerintahan yang demokratis, terutama setelah munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan hakikat penyelenggaraan pilkada secara langsung sebagai langkah untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan lokal (Ansori, 2018).

Selain itu, Penting untuk dicatat bahwa, sebagai alat untuk ganti pemerintah, penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepaskan dengan keterlibatan masyarakat umum. Keterlibatan semacam ini dapat bersifat individual atau terorganisir sendiri, serta terstruktur. Setelah pencabutan Orde Baru, partisipasi masyarakat Indonesia dalam mengawal pemilu mengalami peningkatan yang signifikan (Ramadhanil dkk., 2015). Sebagai sarana penting untuk mencapai perubahan kekuasaan, pemilu memerlukan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat. Keterlibatan ini dapat dilakukan secara pribadi, atas inisiatif sendiri, atau melalui forum-forum yang terstruktur dan terorganisasi.

Di sisi lain, Pasca tumbang rezim Orde Baru, tingkat peran serta masyarakat dalam pengawasan proses pemilu mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan makin tumbuhnya semangat demokrasi dan tekad bersama untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Secara umum, fungsi KIP/KPU adalah sarana dalam menginformasikan berbagai kegiatan yang sifatnya perpolitikan. KIP terdiri dari dua unsur yaitu kesektarian dan komisioner yang mengemban fungsinya masing-masing (Rahayu & Zuhri, 2023).

Lebih lanjut, Teori partisipasi politik (Verba, Scholzman, & Brady, 1995) mengindikasikan bahwa keterlibatan dalam isu-isu yang relevan dapat mendorong partisipasi yang lebih luas. Gen Z cenderung lebih peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan keadilan. Maka dari itu, KIP dapat mengaitkan Pemilu/Pilkada dengan solusi atau perubahan pada isu-isu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Adapun, generasi yang muncul antara tahun 1997 hingga 2012 ini dikenal dengan transformasi digitalnya, memanfaatkan teknologi dan media sosial di hampir setiap aspek kehidupan mereka. Oleh

karena itu, KIP/KPU harus menggunakan berbagai sumber digital untuk mengajarkan dan mengedukasi Gen Z tentang perlunya berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan memberikan informasi yang jelas, ringkas, dan relevan, KIP/KPU dapat meningkatkan kesadaran dan minat politik Gen Z. Mereka akan merasa lebih rileks dan bersemangat untuk berpartisipasi jika kampanye disesuaikan dengan bahasa dan gaya komunikasi dunia digital.

Dalam hal ini, Partisipasi politik yang tinggi di kalangan pemilih muda sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi, terutama di daerah seperti Banda Aceh yang memiliki konteks sosial dan budaya yang unik. KIP diharapkan dapat mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi pemilih melalui berbagai media dan platform yang relevan dengan Gen Z, guna memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam setiap pemilihan (KIP Aceh, 2024). Penelitian ini juga akan membahas berbagai strategi yang telah diterapkan oleh KIP, termasuk penggunaan media sosial, kampanye kreatif, dan program edukasi yang dirancang khusus untuk menarik perhatian generasi muda (Yayang, 2023).

Selain itu, melalui saluran komunikasi yang lebih interaktif seperti aplikasi, media sosial, dan platform daring lainnya, KIP/KPU dapat lebih efektif dalam menjawab pertanyaan dan kekhawatiran Gen Z terkait proses pemilu. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024, Gen Z sebagai bagian dari generasi muda menunjukkan peran yang signifikan dalam dinamika partisipasi politik. Meskipun secara kuantitatif Gen Z bukan kelompok pemilih yang paling dominan, hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa mereka memberikan kontribusi yang penting secara kualitatif, terutama dalam menyuarakan pendapat dan membentuk wacana politik di lingkungan sekitarnya.

Menariknya, Media sosial memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan politik di kalangan remaja. Tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang membentuk opini kolektif. Aktivitas berbagi dan membicarakan isu politik menciptakan bentuk partisipasi baru yang lebih fleksibel dan personal. Fenomena ini dikenal sebagai *connective action*, di mana remaja bisa terlibat politik tanpa melalui organisasi formal (Vromen, Xenos, dan Loader, 2015).

Namun demikian, Generasi Z saat ini diperkirakan berusia 15 hingga 25 tahun. Belum semua usia Generasi Z produktif, tetapi sekitar tujuh tahun lagi seluruh Generasi Z akan masuk usia produktif, dikenal sebagai kelompok yang sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial (Albarzand, 2024)

Untuk itu, Karakteristik Gen Z yang adaptif, kritis, dan aktif di media sosial tetap menjadi aspek menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks bagaimana mereka menafsirkan dan merespons dua jenis pemilihan yang berbeda. Menariknya, fenomena menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik Gen Z lebih tinggi dalam Pilkada dibandingkan Pemilu. Fakta ini menjadi temuan yang cukup mengejutkan, mengingat kecenderungan umum yang menganggap Pemilu sebagai ajang politik yang lebih besar dan lebih menarik perhatian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lokal dan kedekatan emosional dengan kandidat atau isu-isu daerah bisa lebih mendorong keterlibatan politik Gen Z. Mereka memiliki kecenderungan untuk berpikir kreatif, fleksibel, serta menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi permasalahan yang ada. Selain itu, Generasi Z juga terbiasa dengan kolaborasi melalui teknologi, pemanfaatan platform online untuk bekerja secara tim dan berbagi ide dengan orang lain (faizal, dkk 2023)

Karena itu, Menurut ahli komunikasi politik dan digital (Effendy, 2017; Shirky, 2008) menekankan bahwa Gen Z adalah "digital natives" yang sebagian besar waktunya dihabiskan di platform daring. Oleh karena itu, KIP harus aktif di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, X (Twitter), dan bahkan Discord. Konten harus dikemas secara menarik, singkat, visual, dan interaktif (misalnya, infografis, video pendek, kuis, polling, live Q&A dengan komisioner).

Dalam konteks ini, Partisipasi politik generasi muda tidak lagi hanya terbatas pada metode konservatif seperti pemungutan suara, melainkan meluas ke berbagai bentuk keterlibatan digital dan juga sosial. Gen Z juga menunjukkan pola partisipasi yang lebih beragam termasuk aktivitas media sosial yang berperan sebagai alat untuk komunikasi politik dan juga mobilisasi. oleh sebab itu, strategi lembaga seperti KIP perlu menyesuaikan pendekatan mereka dengan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan politik Gen Z secara efektif (Theocharis dan van Deth, 2018).

Berikutnya, Dalam ranah politik dan media sosial, Generasi Z juga memiliki kemampuan untuk mencuri perhatian, terutama pada keahlian dan fleksibilitasnya dalam mengakses informasi. Mereka mahir dalam memanfaatkan, menangkap, dan menyampaikan pendapat di berbagai platform media sosial (Tinambunan, dkk 2024)

Seiring dengan itu, Keterlibatan aktif Generasi Z dalam proses politik yang inklusif memiliki

dampak positif jangka panjang bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan mereka sejak usia muda dalam kegiatan politik yang konstruktif dan memberikan pengalaman positif dalam berpartisipasi, kita turut membentuk generasi pemilih yang memiliki wawasan luas, kemampuan analisis yang baik, serta kecakapan dalam membuat keputusan politik yang bijaksana. Partisipasi awal ini tidak hanya akan memperkuat kesadaran politik mereka, tetapi juga akan menciptakan masyarakat demokratis yang lebih matang dan inklusif.

Secara umum, Generasi Z yang terlatih dan terdidik secara politik akan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terciptanya iklim politik yang terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan publik secara adil dan merata (N. I. Pratama & Darmansyah, 2022). Di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan dominasi media sosial, Generasi Z memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mendorong keterlibatan politik mereka, khususnya dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

Pada saat yang sama, Media sosial dapat dijadikan sarana edukasi politik yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter Gen Z yang dinamis serta terbiasa dengan dunia digital. Strategi komunikasi yang kreatif dan kampanye yang edukatif menjadi kunci untuk membangun kesadaran politik generasi ini. Ruang dialog yang terbuka dan inklusif juga penting untuk mendorong partisipasi aktif mereka. Gen Z perlu memahami bahwa suara mereka memiliki dampak nyata terhadap arah kebijakan dan masa depan bangsa. Keterlibatan politik Gen Z bukan hanya meningkatkan kualitas demokrasi saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran aktif mereka akan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia secara berkelanjutan (I. N. Pratama & Mutiarin, 2019).

Dengan demikian, Budaya media tidak lagi hanya dikendalikan oleh institusi besar, melainkan juga oleh pengguna yang secara aktif berpartisipasi dalam menyebarkan konten. Ini merupakan sebuah peluang bagi lembaga Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk dapat memodifikasi strategi komunikasi yang lebih partisipatif melalui media sosial, sehingga mampu menjangkau generasi muda seperti Gen Z secara lebih efektif (Jenkins, Ford, dan Green, 2013).

Maka dari itu, Rendahnya tingkat partisipasi pemilih muda telah menjadi perhatian di Indonesia. Beberapa ahli mengemukakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya (Norris, 2004). dalam karyanya "Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior" menyoroti bahwa keterlibatan politik generasi muda seringkali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap institusi politik, relevansi isu yang diangkat dalam pemilu dengan kehidupan mereka, serta aksesibilitas informasi dan proses pemungutan suara. Lebih lanjut, (Morrow & Scorgie-Porter, 2017). dalam "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community" mengaitkan penurunan partisipasi sipil, termasuk dalam pemilu, dengan melemahnya modal sosial dan perubahan pola interaksi masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, Maka dari itu perlu pengupayaan penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam menjangkau dan melibatkan Generasi Z memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. (Morrow & Scorgie-Porter, 2017). dalam "Civic Learning and Engagement in a Changing Democracy" menekankan pentingnya penggunaan media digital dan platform online untuk berinteraksi dengan pemilih muda. Generasi Z tumbuh dengan internet dan media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, KIP perlu memanfaatkan saluran-saluran ini secara efektif untuk menyampaikan informasi terkait pemilu, mengedukasi pemilih, dan mendorong partisipasi.

Oleh sebab itu, Bennett dan Segerberg (2012) dalam jurnal "The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics" memperkenalkan konsep "connective action," yang menekankan bagaimana media digital memungkinkan individu untuk membentuk jaringan dan berpartisipasi dalam aksi kolektif berdasarkan minat dan nilai-nilai pribadi. KIP dapat memanfaatkan logika ini dengan membangun kampanye dan menyediakan informasi pemilu yang dipersonalisasi dan relevan dengan minat beragam Generasi Z, sehingga mendorong mereka untuk merasa terhubung dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Sebagai konsekuensi, Lebih lanjut, penelitian tentang literasi digital dan informasi menjadi semakin relevan dalam konteks partisipasi pemilih muda. (Morrow & Scorgie-Porter, 2017). dalam artikel "Educating for Democracy in a Partisan Age: Confronting the Challenges of Fake News and Misinformation" menyoroti pentingnya membekali pemilih muda dengan keterampilan untuk

mengevaluasi informasi secara kritis dan membedakan antara berita yang kredibel dan disinformasi. KIP memiliki peran penting dalam menyediakan informasi pemilu yang akurat dan mudah diakses. Kota Banda Aceh menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk diteliti karena memiliki jumlah mahasiswa yang besar dengan latar belakang politik yang beragam. Pola partisipasi mereka tidak selalu konsisten antara Pemilu dan Pilkada. Beberapa mahasiswa lebih aktif dalam Pilkada dibandingkan Pemilu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam masing-masing jenis pemilihan, serta bagaimana konteks sosial dan politik lokal membentuk preferensi mereka.

Sementara di sisi lain, Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perilaku politik generasi muda mengungkap beragam pandangan terkait partisipasi politik Gen Z. (Az-zahra dkk., 2024) menemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan orientasi politik pemilih pemula dalam Pemilu 2024, sejalan dengan karakteristik Gen Z yang akrab dengan teknologi dan informasi digital. Sementara itu, (Laorensa dkk., 2024) menekankan potensi besar Gen Z dalam menyebarkan informasi politik melalui media digital, namun mereka juga menyoroti tingginya kerentanan generasi ini terhadap penyebaran informasi yang keliru.

Lebih jauh lagi, Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus yang meneliti perilaku politik Gen Z dalam dua konteks pemilihan yang berbeda, yaitu Pemilu dan Pilkada, di satu wilayah spesifik, yaitu Banda Aceh. Penelitian ini tidak hanya melihat tingkat partisipasi, tetapi juga menggali faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural yang memengaruhi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kedua jenis pemilihan tersebut. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang lebih memusatkan perhatian pada satu jenis pemilihan atau hanya pada dimensi digitalisasi, tanpa mempertimbangkan faktor lokal yang lebih relevan.

Meskipun demikian, Teori yang digunakan untuk memahami perilaku politik Gen Z dalam konteks ini adalah teori partisipasi politik dari (Ihromi, 1995), yang membagi partisipasi politik menjadi tiga tingkat: apatis, spectator, dan gladiator. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas politik, baik dalam konteks Pemilu maupun Pilkada. Selain itu, teori perilaku pemilih yang dikembangkan oleh Campbell et al. (1960) juga digunakan untuk menjelaskan pengaruh faktor identitas sosial, informasi, dan persepsi terhadap keputusan politik mahasiswa. Secara hukum, partisipasi politik warga negara dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Dengan dasar hukum ini, partisipasi politik menjadi hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu faktor penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya dari kalangan mahasiswa dan generasi muda. KIP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan partisipasi yang luas dan inklusif. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh KIP dalam menarik perhatian dan mengedukasi Gen Z menjadi aspek yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana KIP merancang strategi untuk menjangkau Gen Z, serta mengukur sejauh mana upaya tersebut berhasil dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa di Pemilu dan Pilkada 2024.

Sebagai penutup, Dengan menggabungkan teori partisipasi politik dan analisis terhadap strategi KIP, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola partisipasi politik mahasiswa Gen Z di Banda Aceh, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi Indonesia. Maka dari itu, tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Gen Z dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Partisipasi Politik (Milbrath dan Goel 1997)

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori :

1. Apatitis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
3. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
4. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Berdasarkan kategori tersebut relevansi yang dapat disimpulkan adalah:

1. Apatitis: Gen z lebih apatis terhadap isu-isu konvensional dan cenderung lebih aktif pada isu-isu yang praktis dan relevan langsung dengan kehidupan mereka. Namun sifat apatis ini bisa berkurang jika pengaruh politik tersebut dapat berpengaruh langsung secara cepat dan nyata terutama dalam kehidupan mereka
2. Spektator: Banyak gen Z yang berperan sebagai "spectators" dalam politik, terutama melalui media sosial. mereka mungkin ikut memilih dalam pemilu atau pilkada, namun mereka cenderung kurang aktif dalam kegiatan politik. meskipun demikian, mereka tetap memberikan perhatian terhadap isu-isu politik yang mencerminkan nilai-nilai mereka terutama dalam hal keadilan sosial, lingkungan dan juga hak asasi manusia.
3. Gladiator: sebagian kecil Gen Z lebih aktif pula terlibat dalam politik yang berperan sebagai "Gladiators" dengan bergabung dalam organisasi politik, menjadi relawan atau aktif di media sosial. ini menunjukkan bahwa meskipun generasi ini lebih memilih aktif melalui sarana digital, namun mereka tetap memiliki semangat aktif dalam memengaruhi kebijakan atau proses politik
4. Pengkritik: Gen Z juga cenderung terlibat dalam bentuk partisipasi politik yang lebih tidak konvensional, seperti protes atau kampanye di platform digital, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka, dan ini sejalan dengan teori Milbrath dan Goel dalam kategori pengkritik.

Dengan memahami kategori-kategori partisipasi politik ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi Gen Z. Strategi tersebut dapat diarahkan agar Gen Z tidak hanya sekadar berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada, tetapi juga lebih peduli terhadap isu-isu politik serta terlibat aktif dalam proses politik itu sendiri.

Teori Perilaku Pemilih (Campbell 1960)

Teori perilaku pemilih yang dikembangkan oleh Campbell, menjelaskan bahwa keputusan pemilih dipengaruhi oleh identitas sosial, afiliasi partai, dan persepsi individu terhadap kandidat. Menurut teori ini, perilaku pemilih tidak hanya didasari dengan keputusan rasional, namun juga ikatan emosional terhadap kelompok sosial, seperti keluarga, agama, dan juga kelas sosial.

Teori Campbell ini relevan untuk memahami perilaku politik Gen Z, karena keputusan politik mereka sering dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan interaksi dengan kelompok seperti teman dan keluarga. Gen Z, terutama mahasiswa, lebih cenderung memilih kandidat yang mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan pandangan mereka, yang dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial dalam lingkungan mereka. Ini menegaskan bahwa faktor sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan politik mereka.

Gen Z

Gen Z adalah peralihan dari generasi milenial dengan teknologi yang makin berkembang. Istilah gen z semakin sering digunakan dalam presentasi yang dipaparkan oleh agen pemasaran dari Sparks dan Honey yang dalam presentasi tersebut tahun lahir yang digunakan untuk mendefinisikan

Gen Z ialah dari tahun 1995 sampai 2010. Gen Z disebut pula dengan iGeneration, generasi internet atau generasi net. Akan tetapi Gen Z dianggap mampu mengaplikasikan seluruh kegiatan pada satu waktu (Sparks dan Honey, 2014)

Dalam konteks Pemilu dan Pilkada, terutama di Kota Banda Aceh tahun 2024, partisipasi Gen Z sangat relevan karena mereka mudah mengakses informasi melalui platform digital. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk meningkatkan partisipasi Gen Z dapat diupayakan melalui penggunaan teknologi dan juga media sosial.

Komisi Independen Pemilihan (KIP)

komisi independen pemilihan (KIP) adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia no 6 tahun 2016 tentang penilihan gubernur dan wakil gubernur aceh, bupati dan wakil bupati, dan / atau walikota dan wakil walikota di wilayah Aceh, pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada daerah khusus ibu kota jakarta, papua dan papua barat.

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah, KIP memiliki tanggung jawab penting seperti menyusun dan merancang tahapan serta jadwal pelaksanaan, menjalankan seluruh proses pemilu mulai dari pendataan pemilih hingga proses penghitungan suara, menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta menetapkan hasil pemilu di daerah. Peran KIP menjadi sangat krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan muda seperti Gen Z. Generasi ini membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi agar mereka tertarik dan terlibat aktif dalam proses pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam strategi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan Generasi Z pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri dinamika dan konteks sosial-politik di balik strategi sosialisasi yang dijalankan oleh KIP secara rinci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, seperti anggota KIP, staf pelaksana sosialisasi, serta representasi dari kalangan Generasi Z. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai strategi yang telah diterapkan, efektivitasnya, serta hambatan yang dihadapi dalam menjangkau pemilih muda.

Penelitian ini juga memuat dugaan awal atau hipotesis mengenai sejauh mana strategi KIP memengaruhi kesadaran dan partisipasi politik Gen Z. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada pemecahan hipotesis tersebut berdasarkan data empirik yang dikumpulkan. Sementara itu, teori partisipasi politik dan teori perilaku pemilih digunakan pada bagian kajian teori sebagai kerangka untuk memahami konteks umum keterlibatan politik pemilih muda, namun tidak dijadikan alat analisis utama dalam pembahasan.

JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi dari pihak KIP Aceh dan juga data sekunder yang diakses dari web resmi pemerintah.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama pihak KIP Aceh dan juga data dukungan yang dibearikan langsung oleh pihak KIP Aceh.

ANALISIS DATA

Dalam penelitian menggunakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maupun data dokumen dianalisis dengan menggunakan parameter yang telah dirumuskan dalam landasan teori/kerangka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hipotesis awal menyatakan bahwa partisipasi politik Gen Z dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh cenderung rendah, disebabkan oleh rendahnya literasi politik dan sikap apolitis mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Gen Z, meskipun memiliki potensi besar untuk mendominasi Pemilu 2024, dipandang kurang tertarik pada politik (Nurfebriansyah and Erviantono 2025). Oleh karena itu, partisipasi mereka dalam Pilkada dan Pemilu di Kota Banda Aceh diperkirakan akan menjadi tantangan besar. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan sebaliknya. Hasil wawancara dengan narasumber mengindikasikan bahwa Gen Z justru menunjukkan respons positif terhadap Pilkada dan Pemilu 2024. Hal ini membuktikan bahwa persepsi rendahnya partisipasi politik Gen Z perlu ditinjau ulang, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pemilihan umum dan kepala daerah.

Selanjutnya, peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z menjadi penting untuk dikaji. Berdasarkan wawancara dengan petugas KIP dan peserta pemilu dari kalangan Gen Z, upaya sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan KIP, terutama melalui media sosial dan platform digital, terbukti efektif dalam menjangkau segmen ini. Pendekatan berbasis teknologi yang lebih inklusif telah berhasil meningkatkan kesadaran politik Gen Z.

Penerapan strategi KIP akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan efektivitas strategis. Penelitian ini juga mengungkapkan perbandingan perilaku pemilih antara Pemilu dan Pilkada 2024, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan konteks antara keduanya dan pendekatan KIP. Dengan menganalisis temuan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana strategi KIP mempengaruhi keputusan politik Gen Z dan bagaimana langkah-langkah ke depan dapat meningkatkan partisipasi politik mereka.

Partisipasi politik Gen Z

Partisipasi politik Gen Z di Banda Aceh dalam Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik dan kompleks. Sebagai kota dengan basis mahasiswa yang besar, Banda Aceh memegang peran penting dalam mendorong keterlibatan generasi muda dalam konstelasi politik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa Gen Z menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap Pemilu 2024. Salah satu temuan yang menarik adalah adanya mahasiswa yang meskipun memiliki KTP di luar Banda Aceh, tetap semangat untuk terlibat dalam proses politik. Beberapa bahkan merasa kecewa karena tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi karena kendala administratif dan waktu, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik di kalangan generasi muda mulai tumbuh dan berkembang.

Secara umum, tingkat partisipasi dalam Pemilu 2024 mencapai sekitar 80%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang hanya mencatatkan 62%. Faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi ini antara lain adalah strategi masif yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), seperti melalui sosialisasi di institusi pendidikan seperti universitas dan sekolah, serta pendekatan komunitas melalui pesantren. Tidak hanya itu, KIP juga menysar tempat-tempat santai yang lebih sering dikunjungi kalangan muda, seperti warkop. Respon Gen Z terhadap sosialisasi ini sangat positif, karena kegiatan tersebut dilakukan di ruang-ruang terbuka yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, yang memudahkan mereka untuk mengakses informasi politik.

Namun, antusiasme Gen Z ini lebih tercermin dalam Pilkada dibandingkan Pemilu. Terdapat

perbedaan mencolok antara Pilkada dan Pemilu, yang terlihat dari lebih tingginya ketertarikan mahasiswa terhadap Pilkada. Hal ini disebabkan oleh adanya kandidat lokal yang lebih mampu menyampaikan visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan dan harapan generasi muda. Ketika informasi yang ditawarkan oleh pasangan calon lebih mudah diakses dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, semangat partisipasi mahasiswa pun meningkat. Ini mengindikasikan bahwa Gen Z cenderung lebih tertarik pada pemilihan yang melibatkan calon kepala daerah yang dapat memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka, daripada Pemilu yang lebih abstrak dan terkesan jauh dari realitas mereka.

Generasi Z sebagai kelompok pemilih muda turut memberikan warna tersendiri dalam dinamika demokrasi Indonesia. Mereka aktif mencari informasi politik melalui media sosial dan merasa lebih terhubung dengan figur-figur politik muda yang dianggap bisa mewakili aspirasi mereka. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang menarik perhatian banyak pemilih muda. Kehadiran tokoh-tokoh seperti ini menciptakan ikatan emosional sekaligus memperkuat ketertarikan Gen Z terhadap politik, khususnya dalam Pilkada yang lebih terasa relevan dengan keseharian mereka.

Di sisi lain, Gen Z juga menunjukkan sikap kritis terhadap praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang. Meskipun praktik semacam itu tidak begitu mencolok di Banda Aceh, terutama mahasiswa, menunjukkan kecenderungan untuk bersikap selektif dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka lebih memilih calon yang memiliki visi-misi jelas dan kredibel dibandingkan tawaran material sesaat. Sikap ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi politik mahasiswa Gen Z di Banda Aceh cukup tinggi dan menunjukkan arah yang progresif dalam membentuk budaya demokrasi yang sehat di masa depan.

Peran KIP dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa Gen Z

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh memiliki peran sentral dalam mendorong partisipasi politik mahasiswa Gen Z, khususnya menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Melalui berbagai strategi pendekatan, KIP berupaya menjangkau kelompok pemilih muda dengan cara yang lebih komunikatif dan sesuai dengan karakteristik generasi ini. Salah satu upaya nyata yang dilakukan KIP adalah menyelenggarakan sosialisasi langsung ke berbagai institusi pendidikan, seperti universitas, sekolah, hingga pesantren. Strategi ini terbukti efektif, mengingat Gen Z cenderung lebih merespons informasi politik ketika disampaikan melalui lingkungan yang familiar. Selain itu, KIP juga memanfaatkan ruang-ruang publik yang menjadi tempat nongkrong favorit anak muda, seperti warkop, untuk menyebarkan informasi seputar proses dan tahapan Pemilu maupun Pilkada. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran KIP akan pentingnya menyesuaikan metode sosialisasi dengan pola komunikasi khas generasi muda.

Tidak hanya sekadar menyampaikan informasi teknis, KIP juga berusaha membangun keterlibatan emosional mahasiswa dengan menghadirkan isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya, KIP menggandeng tokoh muda, aktivis kampus, hingga memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarluaskan pesan-pesan demokrasi. Gen Z yang aktif di media sosial menjadi target utama untuk menjangkau lebih luas pemilih muda yang mungkin belum tersentuh melalui sosialisasi konvensional.

Selain itu, KIP juga melakukan pendekatan secara langsung kepada mahasiswa untuk mendengar pandangan mereka terkait Pemilu dan Pilkada. Pendekatan ini mencerminkan upaya partisipatif dari KIP dalam memahami dan menyesuaikan programnya dengan kebutuhan kelompok muda, bukan hanya sekadar menyosialisasikan secara satu arah. Di Banda Aceh, KIP menilai bahwa mahasiswa lebih kritis dan memiliki kepedulian tinggi terhadap proses demokrasi, berbeda dengan karakteristik pemilih di beberapa kabupaten lainnya. Hal ini menjadi peluang besar yang terus dioptimalkan oleh KIP. Kerja sama KIP dengan jurnalis dan media lokal juga memperkuat penyebaran

informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat, termasuk mahasiswa. Informasi yang jelas dan terbuka menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses Pemilu dan Pilkada. Dengan transparansi dan keterbukaan ini, Gen Z merasa lebih yakin untuk ikut serta dalam proses politik secara aktif.

Secara keseluruhan, peran KIP dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa Gen Z di Banda Aceh dapat dinilai cukup strategis dan adaptif. Melalui pendekatan yang variatif, kreatif, dan partisipatif, KIP mampu menjawab tantangan zaman dalam membangun kesadaran politik generasi muda sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Efektifitas Strategi

Generasi Z dikenal memiliki tingkat literasi politik yang masih rendah, sehingga perlu pendekatan khusus agar mereka lebih terlibat dalam proses demokrasi. Menyadari hal ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh merespons dengan menerapkan berbagai strategi yang disesuaikan dengan karakteristik generasi tersebut untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam Pilkada tahun 2024. Salah satu strategi yang dapat diadopsi adalah dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya yang relevan. (Kadir 2022). mencatat bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam menjembatani kesenjangan antara pemilih muda dan informasi politik, sehingga mampu mendorong keterlibatan mereka secara lebih aktif dalam proses politik.

Strategi yang telah diterapkan menunjukkan hasil yang positif karena Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh mampu menyesuaikan program-programnya dengan karakteristik serta kebiasaan generasi Z, yang merupakan kelompok usia produktif dan didominasi oleh anak muda. KIP pun memfokuskan upaya sosialisasinya kepada kalangan mahasiswa. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Zar, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KIP Kota Banda Aceh, "saat ini kami tidak lagi melakukan sosialisasi di tempat tertutup seperti hotel, melainkan memilih lokasi yang lebih dekat dengan keseharian Gen Z seperti warung kopi (warkop), agar suasana sosialisasi terasa lebih santai dan sesuai dengan minat mereka."

Tak hanya mahasiswa, sosialisasi juga dilakukan di berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, dan universitas di Banda Aceh, yang semuanya menunjukkan antusiasme dan sambutan yang baik terhadap kegiatan ini.

Selain itu, penggunaan media sosial sebagai saluran informasi turut memberikan dampak yang signifikan, mengingat Gen Z sangat aktif di platform digital tersebut. Oleh karena itu, strategi ini dinilai cukup efektif karena tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga mampu menjawab tantangan yang dihadapi generasi muda serta memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat provinsi.

Menelusuri lebih dalam dari hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam partisipasi politik mahasiswa Gen Z di Banda Aceh antara Pilkada dan Pemilu 2024. Partisipasi mahasiswa dalam Pilkada tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari data kuantitatif yang menunjukkan perbedaan jumlah pemilih antara kedua jenis pemilihan tersebut. Faktor-faktor seperti kedekatan dengan kandidat lokal, relevansi visi dan misi yang ditawarkan oleh calon kepala daerah, serta pengaruh media sosial sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Sebagai perbandingan, pada Pemilu, partisipasi mahasiswa cenderung menurun karena mereka merasa kurang terhubung dengan calon presiden yang lebih abstrak dan jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Berikut adalah data mengenai jumlah pemilih berdasarkan generasi pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Table 1. Tabel Perbandingan Jumlah Pemilih Pilkada dan Pemilu

Pemilu (Jumlah Pemilih)		Pilkada (Jumlah Pemilih)	
Gen Z	35.514	Gen Z	36.470

Gen X	66.696	Gen X	46.599
Gen Y	45.649	Gen Y	67.748
Baby Boomers	19.375	Baby Boomers	19.958
Prece Boomers	1.912	Prece Boomers	1.844

Kemudian hasil analisis menggunakan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel (1977), yang membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan: apatis, spectator, dan gladiator. Dalam konteks Pilkada, mayoritas Gen Z dapat dikategorikan sebagai spectator hingga gladiator, karena mereka tidak hanya mengikuti informasi politik, tetapi juga aktif menyuarakan pendapat serta menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu, dalam Pemilu, tingkat partisipasi menurun dan sebagian mahasiswa kembali ke kategori spectator apatis, akibat minimnya daya tarik dari kandidat nasional yang dianggap lebih jauh dengan kehidupan sehari-hari mereka serta kurangnya informasi yang disampaikan secara terbuka.

Fenomena ini juga relevan dengan teori perilaku pemilih Campbell et al. (1960), yang menyatakan bahwa perilaku memilih sangat dipengaruhi oleh identitas sosial, informasi yang diperoleh, serta persepsi terhadap kandidat. Dalam hal ini, Pilkada dianggap lebih menarik karena mahasiswa merasa lebih terhubung dengan kandidat lokal yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Sebaliknya, Pemilu nasional dirasa lebih abstrak dan jauh dari realitas mereka, dengan figur nasional yang kurang mampu menyampaikan pesan yang relevan bagi generasi muda. Strategi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh yang melakukan sosialisasi di ruang-ruang yang dekat dengan mahasiswa seperti kampus, warkop, dan pesantren terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi, khususnya di kalangan spectator yang sebelumnya pasif. Ini menandakan pentingnya pendekatan yang sesuai dengan karakter Gen Z yang cenderung responsif terhadap komunikasi informal dan visual.

Selain itu, semangat mahasiswa yang memiliki KTP luar Banda Aceh namun tetap ingin berpartisipasi juga memperlihatkan bahwa identitas lokal bukan lagi batas utama dalam politik. Mahasiswa Gen Z cenderung membangun hubungan politik berdasarkan isu dan nilai yang mereka anggap penting, bukan hanya karena kedekatan geografis. Hal ini memperkuat poin dalam teori perilaku pemilih bahwa persepsi dan keterhubungan terhadap isu politik lebih berpengaruh daripada latar belakang administratif semata.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi politik Gen Z tidak hanya soal hadir di TPS, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana mereka melihat relevansi politik terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu, para aktor politik perlu lebih memperhatikan kebutuhan dan harapan mahasiswa, terutama dalam menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, kreatif, dan dekat dengan dunia mereka, agar partisipasi politik dapat meningkat tidak hanya dalam Pilkada, tetapi juga dalam setiap tahapan demokrasi.

PENUTUP

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa partisipasi politik Gen Z di KotaBanda Aceh dalam Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Antusiasme yang tinggi terhadap Pilkada, terutama karena kedekatan dengan kandidat lokal, menunjukkan bahwa Gen Z mulai aktif terlibat dalam proses politik. Peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) sangat penting dalam meningkatkan partisipasi ini melalui strategi sosialisasi yang adaptif dan berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan Gen Z, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi lokal. Oleh karena itu, penting bagi para aktor politik untuk terus memperhatikan kebutuhan dan harapan generasi muda dalam menciptakan

komunikasi yang lebih relevan dan terbuka.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik Gen Z di Banda Aceh menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik dalam Pemilu maupun Pilkada 2024. Meskipun Pemilu secara nasional dianggap lebih besar, partisipasi Gen Z terlihat lebih kuat dalam Pilkada karena kedekatan isu dan figur lokal yang dirasa lebih relevan dengan kehidupan mereka. Faktor media sosial, keterbukaan informasi, dan strategi komunikasi dari KIP turut menjadi elemen penting dalam mendorong keterlibatan politik mahasiswa. Peran KIP sebagai lembaga penyelenggara pemilihan terbukti vital, khususnya dalam pendekatan ke generasi muda. Strategi sosialisasi yang inklusif dan adaptif terhadap pola komunikasi Gen Z mampu meningkatkan literasi politik sekaligus partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Saran

Penulis menyarankan agar KIP Banda Aceh terus memperkuat strategi pendekatan kepada pemilih Gen Z melalui media sosial yang lebih interaktif dan relevan dengan minat anak muda. Selain itu, pelibatan langsung Gen Z dalam kegiatan sosialisasi, seperti diskusi terbuka atau konten kreatif bersama komunitas, perlu ditingkatkan agar partisipasi mereka tidak hanya sebatas formalitas, tetapi tumbuh dari kesadaran kritis akan pentingnya pemilu.

Strategi lain yang bisa diterapkan oleh KIP adalah kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, organisasi kemahasiswaan, tokoh masyarakat, dan influencer lokal yang memiliki pengaruh besar di komunitas Gen Z. Melibatkan tokoh-tokoh ini diyakini dapat memperkuat pesan-pesan demokrasi dan meningkatkan motivasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, KIP juga dapat merekrut relawan demokrasi yang bertugas melakukan sosialisasi secara masif dan maksimal di tingkat komunitas, sehingga komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih efektif dan personal. Pendekatan ini dilakukan di Kabupaten Pidie dimana melibatkan relawan demokrasi dan tokoh masyarakat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih marginal.

DAFTAR PUSTAKA

- Albarzand, A. F., Choiriyati, S., & Azizah, M. (2024). Peran Tiktok Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Karyawan Duta Lampung Tahun 2024). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 511-516
- Ansori, A. (2018). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 553. <https://doi.org/10.31078/jk1435>
- Arta, A., Faizal, M. A., & Asiyah, B. N. (2023). The role of Edupreneurship in gen Z in shaping independent and creative young generation. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 231-241.
- Az-zahra, H., Politik, P. I., & Semarang, U. N. (2024). *Pengaruh Kampanye Politik di Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih*. 3(4), 603-620.
- Boediningsih, W., & Budi Cahyono, S. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 288-301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196-211.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya. (Meskipun lebih umum, banyak bab membahas peran media dalam sosialisasi politik dan komunikasi publik)
- Ihromi. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. 491.
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Kesmawan, Andri Putra, and Age Marja. 2021. "Strategi Politik Calon Legislatif Muda Partai Perindo

- Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Merangin." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 2(2):68–79. doi: 10.36355/jppd.v2i2.19.
- Laorensa, E., Wulan Suri, E., & Dani, R. (2024). Peran Media Sosial Dalam Membentuk Persepsi Pemilih Pada Pemilu 2024. *Masyarakat Demokrasi - Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4441>
- Morrow, E., & Scorgie-Porter, L. (2017). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, 6(2), 1–84. <https://doi.org/10.4324/9781912282319>
- Norris, P. (2004). Electoral engineering: Voting rules and political behavior. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, 1–375. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>
- Nurfebriansyah, A. R., & Erviantono, T. (2025). *Pemahaman dan Partisipasi Politik Gen-Z Provinsi Bali Dalam Menyambut Pemilu 2024*. 14(1), 573–586.
- Praduta, A. Y., & Meltarini, M. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). Formulasi Kebijakan Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1), 29–48. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Pratama, N. I., & Darmansyah. (2022). Pendidikan Politik Dalam Rangka Penguatan Partisipasi Politik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Desa Jurumapin. *TRANSFORMASI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3), 202–209. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>
- Rahayu, I., & Zuhri, A. (2023). Manajemen Komunikasi Internal KIP Aceh Singkil Dalam Mengoptimalkan SDM Guna Menjaga Stabilitas Iklim Organisasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6598–6614. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6854> <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6854/5166>
- Ramadhanil, F., Junaid, V., & Ibrohim. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf>
- Suryawijaya, T., Fauzy, M. R. N., & Maulidina, N. F. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Partisipasi Politik Gen Z Pada Pemilu 2024. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 15(2), 125-147. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/4441>
- Theocharis, Y., & Van Deth, J. W. (2017). *Political participation in a changing world: Conceptual and empirical challenges in the study of citizen engagement*. Routledge.
- Tinambunan, C. P., Syailendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik. *Sosio e-Kons*, 16(3), 325-337.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press. (Penelitian komprehensif tentang partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya)
- Vromen, A., Xenos, M. A., & Loader, B. (2015). Young people, social media and connective action: From organisational maintenance to everyday political talk. *Journal of Youth Studies*, 18(1), 80-100.
- Zar, M. (2025, 20 Maret). Strategi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilu dan Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2024 [Wawancara pribadi].
- Zulfan, Z., Amin, M., & Saleh, A. (2022). Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Marginal pada Pemilu 2019. *PERSPEKTIF*, 11(2), 428-442.